ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan model kelembagaan pengelolaan TPA Legognangka yang akan dimanfaatkan oleh 6 daerah yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini diusulkan 3 (tiga) alternatif model kelembagaan yang akan dinilai berdasarkan penilaian para ahli menggunakan metode AHP. Ada pun kriteria-kriteria penentu dalam penilaian alternatif model kelembagaan tersebut adalah (1) Kemampuan Unit, (2) Pola Kerjasama dan Kewenangan, (3) Pengambilan Keputusan, (4) Pola Pengawasan, (5) Sumber Pembiayaan, dan (6) Profesionalitas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan hasil-hasil sebagai berikut: (1) Diantara enam kriteria yang disertakan dalam analisis, kriteria pola kerjasama dan kewenangan dianggap paling penting dalam menilai alternatif model kelembagaan yang diusulkan, (2) Hasil analisis berdasarkan 6 kriteria yang dilibatkan menunjukkan bahwa model 2 lebih baik dibandingkan model 1 dan model 3, dan (3) Dari enam kriteria yang digunakan sebagai alat analisis, model 2 memiliki keunggulan dalam 5 kriteria (Kemampuan Unit, Pola Kerjasama dan Kewenangan, Pengambilan Keputusan, Pola Pengawasan, dan Profesionalitas), sementara model 1 memiliki keunggulan pada kriteria Sumber Pembiayaan.

Dari hasil analisis, selanjutnya dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) Penggunaan metode AHP dalam penelitian ini kurang menunjang konsensus dari penilaian responden sehingga dapat digunakan metode Delphi untuk lebih menunjang konsensus dari penilaian responden, (2) Data untuk metode AHP dalam penelitian ini mengandalkan penilaian responden terhadap kriteria-kriteria yang diajukan. Karena penilaian akan sangat bervariasi antar satu dengan yang lainnya maka penambahan jumlah responden dengan sumber yang semakin luas perlu dilakukan guna menjada konsistensi data, dan (3) Dalam penelitian ini hanya diuji 3 (tiga) buah model saja, oleh karena itu perlu ditambahkan bentuk model kelembagaan lainnya seperti BLU (Badan Layanan Umum) dan Regional Management sebagai bahan pembanding dalam pembobotan menggunakan metode AHP.